

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah R. & Muhammad A. Ramdhani. (2017). *Jurnal Publik* Volume 11, Nomor 01.
- Adhi S. (2017). Implementasi Peraturan Daerah No 01 Tahun 2013 Tentang Pandai Membac Al-qur'an di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, *Jurnal FISIP* Volume 04 , Nomor 01.
- Dunn, William N., 2003. *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Pearson Education. Edisi bahasa Indonesia dengan judul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edward III, George. *Implementation Public Policy*. New York : Congressional Quarterly Press, 1980
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Idhan (2018). Implementasi Kebijakan Pendidikan Baca Tulis AL-qur'an (Studi kasus TPQ Kecamatan Tamanlarea Kota Makassar). Universitas Negeri Makassar. Volume 01, Nomor 02
- Kartasasmita, Ginanjar. 1995. *Masalah Kebijakan dalam Pembangunan*. Jakarta: STIA-LAN RI
- Nugroho, Riant. 2009. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Sadiyah dkk. (2018). Implementasi Model Pembelajaran dalam Pemberantasan Buta Huruf Al-qur'an di Majelis Taklim Nurul Hikmah Kampung Situ Uncal Desa purwasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. *STAI Al-Hidayah Bogor*. Volume 02, Nomor 01.
- Silviana S. (2017). Implementasi Program Pengentasan Buta Aksara di Kabupaten Bondowoso, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan* Volume 05, Nomor 02.
- Subarsono, A. G. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2014a. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
-2014b. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Usman. (2015). Implementasi Kebijakan Kementerian Agama Terhadap Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-qur'an di Kabupaten Pasuruan, *Jurnal Pendidikan Islam* Volume 1, Nomor 1.
- Wahab, Solichin A., 1997. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Caps

Berikut lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Nasional tentang pemberantasan buta aksara

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 35 TAHUN 2006

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN
GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- | | |
|------------------|--|
| Menimbang | bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009; 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar; |